

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor yang sangat berperan dalam menentukan pemerintahan yang baik adalah peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan dan mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan negara yang semakin besar dibandingkan sebelumnya. Bagaimanakah kinerja mereka enam tahun setelah penerapan desentralisasi tersebut dengan tidak adanya sistem pemantauan, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang sistematis, pertanyaan penting tersebut tidak dapat dijawab secara akurat.

Semua pemangku kepentingan telah menyadari pentingnya pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, dan sejumlah latihan percobaan oleh instansi-instansi pemerintah serta organisasi-organisasi nasional maupun internasional telah dilakukan, namun tidak ada perangkat evaluasi komprehensif yang telah diterapkan di tingkat nasional. Perangkat yang diterapkan ditingkat nasional tidak hanya akan mendorong semangat oleh warga negara untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah dengan praktik-praktik terbaik di kota/kabupaten lainnya.

Masalah yang ada dalam pemerintahan dan daya saing mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Terjadinya fenomena pergantian pemerintah yang secara substansi mengundang perdebatan dan untuk menghindari terulangnya pemerintahan yang kurang baik yang pernah ada, maka kebutuhan metode pengukuran kinerja pemerintah yang lebih objektif, terukur, transparan dan disepakati semua pihak merupakan hal yang tidak terhindarkan jika kita ingin mempraktekan kehidupan yang lebih baik.

Sebagai mana yang tertera dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan harapan dapat

menjadi acuan dan jembatan bagi parameter yang digunakan dalam pengukuran mengacu pada berbagai teori dan paradigma yang sedang berkembang.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih menyiapkan diri dalam memasuki era globalisasi terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi dalam persaingan yang datang dari dalam negeri sendiri. Untuk menghadapi persaingan tersebut, daerah membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang baik (good governance).

UNDP dalam Mardiasmo (2002) menyatakan, bahwa karakteristik good governance meliputi : pertama participation, yaitu keterlibatan dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Kedua, rule of law artinya adanya kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Ketiga, transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Keempat, Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders. Kelima, Consensus Orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Keenam, Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Ketujuh, Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Kedelapan, Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Kesembilan, Strategic Vision. Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dalam mengelola anggaran negara dan daerah di tengah krisis ekonomi seperti saat ini sungguh sangat berat, karena sumber-sumber penerimaan dalam kondisi sangat terbatas. Untuk mengurangi defisit anggaran dari sisi penerimaan diperlukan inovasi dan kerja keras dari seluruh aparat pemerintah untuk mencari dan menggali lagi sumber-sumber penerimaan baru secara adil dan tidak merugikan kepentingan masyarakat, sedangkan dari sisi pengeluaran harus berdasarkan pada konsep value for money, artinya dalam mencari dana maupun menggunakan dana pemerintah daerah dituntut selalu menerapkan prinsip 3E (Ekonomi, Efisien, dan Efektif). Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan setiap rupiah dana yang diperoleh dan dipergunakan.

Selama ini manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya tidak dilakukan secara prudent (hati-hati), sehingga kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini disebabkan kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Perencanaan anggaran yang lemah juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sudah merupakan suatu keharusan di era otonomi ini pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga akan dapat meningkatkan kinerja bagi pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran dan mengelola sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam usaha meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Industri kecil dan menengah di Indonesia sampai saat ini mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan pendapatan per kapita yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini dikarenakan dari sektor industri kecil dan

menengah ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Oleh karena itu industri kecil dan menengah perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sehingga dapat berkembang dan dapat bersaing dengan industri-industri besar yang ada, karena dengan makin berkembangnya industri kecil dan menengah yang ada akan semakin banyak menyerap tenaga kerja dan memajukan sektor koperasi di Provinsi Sumatra Barat.

Perkembangan pembangunan ekonomi di berbagai sektor dan tingkatan nasional telah mengalami perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia, sehingga produksi nasional yang berasal dari luar pertanian merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi tulang punggung ekonomi. Sehingga industri merupakan pembangunan ekonomi yang mempunyai posisi strategis dan berperan mendorong pemerataan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara internasional yaitu dengan adanya globalisasi ekonomi untuk terciptanya pasar bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah, dan juga ditunjang dengan adanya kebijaksanaan pemerintah pusat dalam rangka diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah sehingga daerah diberikan kebebasan yang bertanggung jawab dalam menggali potensi dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi secara terpadu, terarah dan tersistem.

Pembangunan bidang ekonomi secara terpadu, terarah dan tersistem akan ditekankan untuk penanggulangan permasalahan diantaranya masih banyak industri - industri kecil dan menengah yang belum mempunyai standard baku mutu yang dipersyaratkan oleh pasar internasional. Karena pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya mengalami tantangan yang serius dalam masalah promosi dan pemasaran serta penyediaan fasilitas sarana promosi.

Sementara sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan tersebut tidak mudah diperoleh. Sehingga membuat semakin sulitnya industri kecil untuk mengembangkan kegiatan usaha secara cepat. Untuk itu pengembangan industri kecil perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah yang dalam hal ini sebagai fasilitator/pelayanan untuk menciptakan iklim yang kondusif pada pembangunan ekonomi.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memberikan pelayanan promosi dan Pemasaran serta penyediaan fasilitas sarana promosi dan Pameran bagi IKM Sumatera Barat yang dimana tugasnya dibantu oleh UPTD Promosi dan Pemasaran.

Pelaksanaan kegiatan tersebut tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 516/2350/BPP/IV-2017 tentang uraian tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kasus diatas, maka penulis mencoba membahas masalah yang menyangkut sektor industri kecil dan menengah yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas sarana promosi. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan dalam rangka membantu IKM yang ada Sumatera Barat dalam hal promosi dan penyediaan fasilitas promosi dalam pelaksanaan magang dengan mengangkat judul “ **EVALUASI KINERJA PADA UPTD PROMOSI DAN PEMASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMATERA BARAT**”.

1.2. Rumusan Masalah

Evaluasi kinerja pada UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat

secara komprehensif mengenai capaian kinerja dari misi dan strategi UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat keseluruhan.

Perumusan masalah yang ditulis dalam permasalahan ini adalah :

1. Bagaimana kinerja dari UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017.
2. Apa saja program kegiatan UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017.

1.3. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan dari pada kegiatan magang pada UPTD Promosi dan Pemasaran adalah untuk mengetahui peranan UPTD Promosi dan Pemasaran dalam rangka peningkatan promosi dan pemasaran produk IKM

Sedangkan tujuan secara khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan magang pada UPTD Promosi dan Pemasaran adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan pada UPTD Promosi dan Pemasaran.
3. Untuk mengetahui dan memahami peranan UPTD Promosi dan Pemasaran.
4. Untuk mempraktekan ilmu teori yang didapat dari perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

5. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkup yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang didapat setelah melakukan kegiatan magang pada UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini adalah :

1. Dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pada UPTD Promosi dan Pemasaran ini.
2. Dapat mengetahui kinerja keuangan pada UPTD Promosi dan Pemasaran ini.
3. Dapat mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja sebenarnya

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Adapun dalam pemilihan tempat magang ini penulis memilih dibagian keuangan pada UPTD Promosi dan Pemasaran .Hal ini dimaksudkan untuk mencocokkan dengan judul proposal yang penulis buat nantinya dan digunakan sebagai judul pembuatan laporan akhir/laporan magang.

Sesuai dengan kebijakan fakultas yang memberikan kriteria tempat-tempat magang bagi mahasiswa, maka penulis merasa perlu mencari tempat yang sesuai dengan kriteria ini, dimana hal mendasar adalah tempat yang sesuai dengan jurusan penulis dalam hal ini adalah Jurusan Keuangan Negara.

Berdasarkan hal diatas penulis berusaha mencari tempat yang dapat mengakomodasikan kegiatan penulis dan pemenuhan praktek pengelolaan atau manajemen instansi pemerintah.Pada akhirnya penulis memutuskan instansi pemerintah yang menjadi

pilihan adalah UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat .

Adapun pelaksanaan ataupun waktu yang penulis laksanakan dalam kegiatan magang, penulis memperkirakan pada bulan januari sampai dengan bulan februari yang dalam teorinya berlangsung selama 40 hari kerja yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik.

1.6. Rencana Kegiatan

Susunan rencana kegiatan selama mengikuti kuliah kerja lapangan/magang adalah sebagai berikut :

1. Membuat proposal magang
2. Mengajukan proposal magang kepada ketua program studi
3. Mengajukan surat izin magang kepada koordinator
4. Mengantarkan surat izin magang ke Instansi beserta pengambilan surat jawabnya.
5. Pelaksanaan magang :
 - a. Mengenai lingkungan kerja
 - b. Mengetahui gambaran umum UPTD Promosi dan Pemasaran
 - c. Mengetahui aktivitas UPTD Promosi dan Pemasaran dalam memenuhi visi dan misinya

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar penulisan laporan ini nantinya akan dikelompokkan atas :

BAB I PENDAHULUAN

Mencangkup latar belakang, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang, rencana kegiatan magang dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang pendekatan teoritis yang melandasi penulisan tugas akhir, antaranya, pengertian evaluasi dan kinerja, tujuan serta fungsi evaluasi kinerja.

BAB III EVALUASI KINERJA PADA UPTDPROMOSI DAN PEMASARAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Berisi tentang lokasi dan gambaran umum UPTD, objek kajian, evaluasi kinerja pada UPTD Promosi dan Pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan .

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran

